

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERIKANAN



RENJA
(RENCANA KERJA)
TAHUN 2020

Jl. Jend. Sudirman Km. 2,5 Telp 0517-31490 Fax 0517-31491
enail diskan_tapin@yahoo.com
RANTAU 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan dari perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapin secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini. Kami menyadari bahwa Renja ini perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Renja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan perikanan di masa mendatang. Demi kesempurnaan Renja ini dan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Rantau,

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tapin,

H. Parianata, S.AP, MM
NIP 19660512 198602 1 006

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan RenjA.....	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	16
	2.3. Isu-isu penting tugas dan fungsi.....	17
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	26
	3.2. Tujuan dan Sasaran	28
	3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	32
BAB IV	PENUTUP	35

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERIKANAN

Jl. Jend. Sudirman KM. 2,5 Telp 0517-31490 Fax 0517-31491
email diskan_tapin@yahoo.com RANTAU

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perikanan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan SKPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2020 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perikanan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2020 disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) pengolahan data dan informasi,
- 2) menganalisis gambaran pelayanan SKPD;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- 4) Mengidentifikasi Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- 5) Menelaahan rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

11) Pembahasan forum SKPD; dan

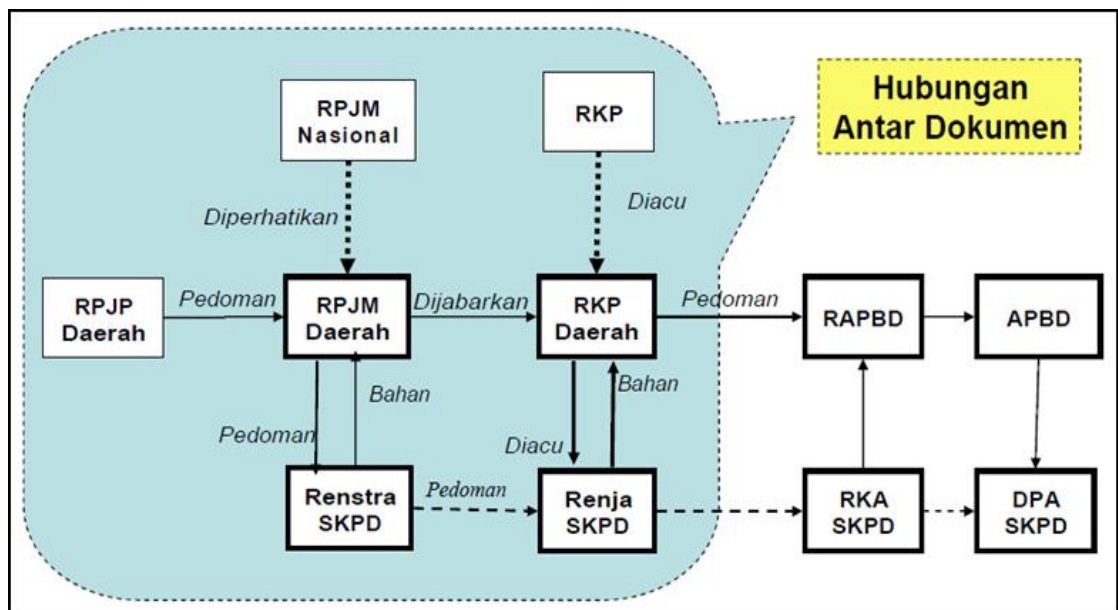
12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Renja SKPD merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Hubungan antara Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2020 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Renja dengan dokumen RKPD



Dari diagram tersebut di atas, maka hubungan antara Renja dan RKPD dapat dijelaskan sebagai berikut: Renja merupakan bahan masukan dalam musrenbang RKPD. RKPD merupakan acuan dalam menyusun KUAPBD, KUAPBD merupakan acuan dalam menyusun PPAS. PPAS dipakai dasar acuan menyusun Rancangan APBD.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin sebagai SKPD yang membidangi Perikanan di Kabupaten Tapin menindaklanjuti hasil dari proses perencanaan pembangunan dalam Bidang Perikanan. Proses Perencanaan

diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, selanjutnya hasil Musrenbang Desa dibawa ke tingkat Musrenbang Kecamatan, dan tahapan berikutnya adalah Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil Musrenbang inilah yang menjadi dasar Dinas Perikanan menyusun Renja SKPD.

Dari diagram tersebut di atas, maka hubungan antara Renja dan RKPD dapat dijelaskan sebagai berikut: Renja merupakan bahan masukan dalam musrenbang RKPD. RKPD merupakan acuan dalam menyusun KUAPBD, KUAPBD merupakan acuan dalam menyusun PPAS. PPAS dipakai dasar acuan menyusun Rancangan APBD.

Dalam implementasi penyusunan Renja SKPD, dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan antara lain melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan bottom-up/top-down.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan :

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis adalah program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, dan dilaksanakan tahapan pertahunnya di Renja SKPD.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas bawah (top-down) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Tahun 2020 sekaligus untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2020
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2020
3. Indikator kinerja Dinas Perikanan tahun 2020
4. Kelompok sasaran Dinas Perikanan tahun 2020
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2020

Sedangkan tujuan rencana kerja (Renja) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan teknis pengembangan dan pengendalian budidaya perikanan ;
2. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan perikanan;
3. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan nelayan kecil;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pembudidaya ikan kecil;
5. Melaksanakan pembinaan teknis pemberdayaan Usaha perikanan;
6. Melaksanakan pembinaan teknis perlindungan dan pengawasan kegiatan perikanan;
7. Melaksanakan kemitraan dalam budidaya perikanan;
8. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
9. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan;
10. Melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas

1.4 . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin yang terdiri dari : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, Analisa Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- III. Tujuan, Sasaran, Program OPD Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan
- IV. dan Kegiatan yang terdiri dari : Rencana Kerja dan Pendanaan Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan ;
- V. Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2019 dan capaian Renstra Dinas Perikanan tahun 2019

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Disnakan. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengukuran kinerja dan pengukuran sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Dalam Tahun Anggaran 2019 dana yang di sediakan yang bersumber dana APBD Murni sebesar Rp. 1.899.674.524,00.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian hasil pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas 8 (delapan) kegiatan rencana dipergunakan dana sebesar Rp. 767.525.000,00 Untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%, namun ternyata dapat tercapai dengan hanya menggunakan dana sebesar

Rp. 744.741.487,00 atau sebesar 97,03% hal ini berarti terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran. Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 92.600.000,00, terealisasi sebesar Rp. 78.948.581,00 atau 85,26 %, dengan realisasi fisik 100%, karena pertanggungjawaban sesuai dengan rekening pembayaran atau pemakaian

b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah dana yang tersedia yaitu sebesar Rp. 18.905.000,00 dan dengan realisasi sebesar 8.380.000,00 atau sebesar 97,22%. Ini semua realisasinya adalah pada realisasi barang dan jasa.

c) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outcome yang diharapkan pada kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran. Jumlah dana tersedia sebesar Rp. 52.120.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.909.000,00 atau 85,26%.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah dana yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.479.800,00 atau sebesar 91,92 %, fisik 100%.

e) Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk penyediaan makanan dan minuman aparat disediakan dana sebesar Rp. 61.800.000,00 untuk menghasilkan output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% ternyata pencapaian yang diperoleh termasuk dalam kategori baik yaitu sebesar Rp. 60.138.200,00 atau 98,19 % dari dana yang disediakan.

f) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dimulai tahun 2018 untuk rekening belanja perjalanan Dinas baik dalam Daerah maupun perjalanan Dinas luar Daerah pada kegiatan yang lain pada masing – masing bidang sudah di tiadakan tetapi semua rekening belanja perjalanan Dinas tergabung dalam kegiatan rapat rapat

koordinasi dan konsultasi . Indikator outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuanga. dan telah tercapai baik dengan pencapaian input dana sebesar Rp. 514.393.406,00 atau 94,48 % dari pagu dana sebesar Rp. 517.100.000,00 dengan sisa dana Rp. 2.706.594,00.

g) Tapin Expo

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 19.992.500,00 atau 99,96%, fisik 100%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian hasil pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan rencana dipergunakan dana sebesar Rp. 48.195.000,00 adapun Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 42.861.600,00 atau sebesar 88,96 %. Pencapaian kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Kantor

Input dana yang digunakan pada kegiatan ini direncanakan sebesar Rp. 10.885.000,00 untuk pengadaan 2 unit printer dengan realisasi anggaran 10.285.000,00 atau 97,22 %, fisik 100%.

b. Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas Operasional

Input dana yang digunakan pada kegiatan ini direncanakan sebesar Rp. 23.310.000,00 untuk di manfaat pemeliharaan kendaraan operasional roda empat dan roda dua sebanyak 18 buah dan telah terealisasi sebesar 19.626.600,00 atau 87,97%,

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Input dana yang digunakan pada kegiatan ini direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan telah terealisasi 12.950.000,00 atau 86,83 %.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian hasil pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan rencana dipergunakan dana sebesar Rp. 7.650.000,00 Untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%, namun ternyata dapat tercapai dengan hanya menggunakan dana sebesar Rp. 5.058.000,00 atau sebesar 66,18 % hal ini berarti terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran. Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Input dana yang digunakan pada kegiatan ini direncanakan sebesar Rp. 5.050.000,00 dan telah terealisasi 3.725.000,00 atau 73,76 %.
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
Input dana yang digunakan pada kegiatan ini direncanakan sebesar Rp. 2.600.000,00 dan telah terealisasi 1.333.000,00 atau 51,27 %, fisik 100%.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini mempunyai substansi untuk menumbuh kembangkan kawasan sentra – sentra produksi perikanan di perairan air tawar, rawa dalam rangka mendukung pertumbuhan sentra minabisnis secara terpadu, penyediaan sarana dan prasarana berbasis perikanan dalam rangka mendukung kegiatan produksi Perikanan budidaya.

Anggaran yang di sediakan pada tahun 2019 untuk program ini dari sumber dana APBD dan DAK sebesar Rp. 1.407.564.524,00 dan dengan anggaran terealisasi sebesar Rp. 1.345.758.825,00 atau sebesar 95,61 % . secara rinci kegiatan Program Pengembangan budidaya perikanan dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

- a) Pengembangan BBI Lokal Linuh
Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 269.770.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 241.376.525,00 atau sebesar 89,47 %, fisik 100%.
- b) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 594.603.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 94.456.000,00 atau sebesar 89,62 %. dan realisasi Fisik 100 %.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (DAK)

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 543.565.000,00, terealisasi sebesar Rp. 535.070.300,00 dengan realisasi keuangan sebesar 99,54%..

Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan penumbuh kembangan kelompok baik kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) , Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (UPI) juga memfasilitasi pengolahan pasca panen, pengolahan dan pemasaran . Program ini terealisasi sebesar 86,40 % atau sebesar Rp. 255.246.650,00 dari pagu Anggaran sebesar Rp. 295.437.500,00 yang secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

a. **Pengelolaan Sistem Informasi Data Perikanan**

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 70.985.000,00 terealisasi sebesar Rp. 65.331.000,00 atau sebesar 92,03 %,rendahnya serapan dana disebabkan karena Anggaran Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan

b. **Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan**

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 3.500.000,00 untuk Realisasi Anggaran tahun 2018 tidak ada karena hanya kegiatan pencarian data informasi pasar di lapangan yang anggarannya masuk dalam kegiatan Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi, di lakukan efisiensi akibat defisit Anggaran.

c. **Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan**

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 176.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 165.579.500,00 atau sebesar 94,08 %

d. **Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan**

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 14.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,00 atau sebesar 20,22 %, rendahnya realisasi fisik dan keuangan di sebabkan karena anggaran pemerintah Kabupaten Tapin yang masih defisit sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perlu prioritas untuk kegiatan yang mendesak.

e. Penumbuhkembangan Kelompok

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 30.112.500,00 terealisasi sebesar Rp. 21.336.150,00 atau sebesar 70,85 %, karena di anggap kurang prioritas dan tidak mendesak ada beberapa kegiatan yang pelaksanaanya di tangguhkan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan program tahun sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada perbedaan yang signifikan dari indikator kinerja tahun 2019. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah Prosentase peningkatan produksi Perikanan tangkap dan budidaya.

Indikator tersebut merupakan perencanaan yang dirumuskan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM sehingga penyerapan produk meningkat dan dapat meningkatkan daya saing masyarakat.

Indikator Kinerja hasil dari pelayanan Dinas Perikanan dalam penegakan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, adalah berdasarkan kepada hasil dari sasaran Dinas Perikanan itu sendiri. Untuk Dinas Perikanan mempunyai sasaran dan indikator pelayanan Seperti terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

NO.	IKK	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
		TARGET		REALISASI		PADA TAHUN					PADA TAHUN				
		2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	100	100	97,88	106,41	100	100	100	100	100	63,66	-	-	-	-
a.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya	100	100	98,29	111,84	100	100	100	100	100	103,8	-	-	-	-
b.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	100	100	100,09	100,97	100	100	100	100	100	137,5	-	-	-	-

2.3 Isu-isu penting tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

Dinas perikanan sampai saat ini selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan untuk rekomendasi untuk kredit KKP dan KUPS, sebelum keluarnya rekomendasi ini terlebih dahulu petugas lapangan melakukan ceking lapangan ke bawah yaitu terhadap lahan masyarakat/kelompok yang mengajukan kredit dan pelayanan lainnya dalam bidang bididaya, pelestarian sumberdaya perikanan dan penangkapan ikan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin secara sinergi dimana banyak kegiatan lintas sektoral yang telah dilaksanakan tetapi belum berkesinambungan dan memberikan hasil yang optimal.
- b. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang perikanan yang masih perlu ditingkatkan sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.
- c. Kebijakan dalam penyediaan petugas lapangan yang membatasi daerah dalam pemenuhan petugas lapangan yang dibutuhkan di setiap kecamatan sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.

Berbagai hambatan yang ada tentunya akan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja yang dituangkan dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Tantangan dalam pelayanan di Dinas Perikanan sebagai berikut :

- Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin dengan optimal dimana banyak kegiatan lintas sektor yang telah dilaksanakan tetapi belum berkembang dan berkesinambungan dengan baik.
- Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang perikanan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.

Sedangkan peluang yang muncul dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, sebagai berikut :

- Adanya kemudahan komunikasi, akan mempercepat dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan terhadap masyarakat dan penanggulangan masalah- masalah yang harus segera ditangani serta meningkatkan koordinasi.
- Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung program2 bidang perikanan dilihat dari prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun RKPD.

Isu-isu penting tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang dapat dijadikan acuan kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Tapin Tahun 2018 adalah :

d. Menurunnya Kualitas Benih

Penggunaan benih ikan bibit unggul di bidang Perikanan adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan dalam pencapaian Target produksi merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan.

Salah satu cara peningkatan kualitas benih ikan adalah melalui sertifikasi CPIB (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik) yang harus didukung oleh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, system informasi dan kesadaran pembudidaya dalam menggunakan benih unggul.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin telah mengupayakan agar BBI (Balai Benih Ikan) dan UPR (Unit Perbenihan Rakyat) sebagai produsen benih di Kabupaten Tapin bisa mendapatkan sertifikat tersebut dengan mengupayakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan .

e. Rendahnya Penguasaan Teknologi dan Informasi Perikanan

Usaha perikanan di Kabupaten Tapin saat ini umumnya dikelola dalam skala rumah tangga. Skala itu dicirikan dengan bersifat tradisional, semi intensif dan merupakan usaha sampingan, sehingga usaha perikanan tersebut belum berorientasi agribisnis dan berorientasi pasar. Hal tersebut mengakibatkan kontribusi usaha perikanan terhadap pendapatan keluarga masih rendah.

Perubahan orientasi agribisnis (budidaya ikan) perlu didukung oleh peningkatan penguasaan teknologi dan informasi sebagai salah satu syarat penumbuh kembangkan budaya wirausaha. Hal inilah yang menjadi focus utama Dinas Perikanan untuk kemandirian pembudidaya ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin melalui dana APBD kabupaten dan mengusulkan melalui APBD Provinsi telah menyusun program pelatihan petugas dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan teknis

pengetahuan dan keterampilan seperti memijah, kesehatan ikan dan keterampilan perikanan lainnya.

f. Terbatasnya Kemampuan Akses Permodalan

Permodalan adalah hal klasik yang sering didengar dalam usaha pengembangan bidang Agribisnis khususnya perikanan. Usaha perikanan rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan ke pelosok desa sehingga proporsi alokasi dan penyerapan pembiayaan kecil, hal ini diperparah dengan kelembagaan petani yang belum solid dan belum mampu mengelola administrasi secara profesional. Penguatan akses permodalan perlu diupayakan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok dengan memperkuat administrasi dan manajemen kelompok.

g. Masih Adanya kegiatan Illegal Fishing

Faktor keamanan dan pemanfaatan sumberdaya secara illegal adalah permasalahan yang terus dan perlu perhatian khusus dalam rangka pengembangan kawasan sentra ikan. Kabupaten Tapin melalui Dinas Perikanan berusaha melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian bantuan peralatan penangkapan atau pemeliharaan. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan bahaya yang dihasilkan apabila terjadi kepunahan terhadap spesies dan keseimbangan ekosistem.

h. Kesehatan Ikan

Penularan penyakit ikan yang disebabkan pengrusakan lingkungan, merupakan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan perikanan. Penyebaran virus dan penyakit lainnya melalui media perairan masih cukup rentan terjadi dan merupakan resiko yang cukup tinggi dalam pembudidayaan ikan.

Pengrusakan lingkungan dengan pemberian racun ataupun sejenisnya yang dilakukan secara sengaja masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan resiko kerugian besar bagi pembudidaya ikan maupun keseimbangan ekosistem perairan.

Pencegahan dan Penanggulangan secara terpadu harus dilaksanakan untuk menghindari dan mengurangi resiko kerugian yang terjadi. Pencegahan sebelum terjadi dilakukan dengan sosialisasi, pemeriksaan rutin dan pelayanan pengaduan deteksi dini, penanggulangan kasus dilakukan dengan prinsip cepat, tepat untuk mencegah kerugian yang lebih tinggi lagi baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemanusiaan.

i. Ketersediaan Air

Ketersediaan air merupakan masalah yang klasik terjadi ada kegiatan budidaya perikanan terutama pada musim kemarau, terjadi perebutan air dengan sektor pertanian pada umumnya dan padi pada khususnya terutama pada centra lokasi pertanian dan Perikanan, hal ini telah diupayakan dengan pembuatan saluran kuarter melalui dana APBD Kabupaten Tapin .

Sebaliknya pada musim hujan adakalanya terjadi banjir besar karena tingginya curah hujan yang terjadi di kabupaten Tapin yang bisa mengakibatkan kerugian yang cukup tinggi bagi pembudidaya ikan, walaupun sudah di upayakan dengan memasang jaring pengaman pada kolam kelompok pembudidaya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini dibuat untuk menampilkan perbedaan kebutuhan program serta outcome atau hasil kerja dari program atau kegiatan didalam dokumen RKPD dengan kebutuhan aktual berdasarkan prioritas, kinerja, dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan Daerah.

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapin tahun 2019 terdapat 5 (lima) prioritas rencana pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Dari ke lima aspek prioritas di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Tapin sebagai salah satu SKPD mempunyai kompetensi pada prioritas yang kedua yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

- Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
- Agrobisnis merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
- Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
- Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2019 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lampiran tentang kewenangan daerah dalam bidang Dinas Perikanan, dimana target – target pada regulasi diatas diakomodasi dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Bidang Perikanan dengan mensinkronkan terhadap isu – isu bidang Perikanan yang terjadi saat ini, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perikanan tiap tahun sebagai pedoman perencanaan penyusunan kegiatan pada tahun berjalan, dengan tujuan Renja yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah :

- a. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tapin pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2020 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja pada tahun	
				Tahun 2021	Kondisi Akhir Periode (%)
1	Meningkatnya sektor agribisnis				
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya	100	100
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	100	100

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas usaha perikanan yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan meningkatnya pendapatan
2. Meningkatkan Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan Kualitas Hasil monitoring dan evaluasi kinerja
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan yang ramah lingkungan

Sasaran RENJA adalah mengacu untuk pencapaian sasaran RENSTRA Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun sasaran pembangunan n perikanan tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya produksi ikan konsumsi
2. Meningkatnya jumlah peternak dan petani ikan yang berusaha di bidang peternakan dan perikanan serta meningkatnya pendapatan
3. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang refresentatif
5. Meningkatnya pemahaman kerja praktis SDM
6. Meningkatnya Pencatatan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
7. Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Perikanan sesuai Standar
8. Meningkatnya Ketersediaan hasil perikanan Indikator Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah Prosentase peningkatan ketersediaan bahan pangan asal ikan yang layak konsumsi
9. Meningkatnya sumberdaya manusia perikanan yang terdidik dan terlatih
10. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan yang ramah lingkungan

Dalam pelaksanaan amanah pembangunan bidang perikanan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam lima tahun mendatang yang dihadapi yaitu:

1. Produktivitas lahan perikanan yang beralih fungsi
2. Sistem irigasi termasuk kondisi waduk pada saat musim kemarau yang semakin memprihatinkan;
3. Produktivitas dan daya saing hasil perikanan belum optimal;
4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perairan umum belum optimal;
5. Ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi;
6. Pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal;
7. Sumber daya air belum terkelola dengan baik;
8. Belum pulihnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Nasional;

9. Luas hutan dan lahan kritis yang masih tinggi dan laju deforestasi yang masih relatif tinggi;
10. Kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal;
11. Pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal;
12. Dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan;
13. Frekuensi kejadian bencana dan kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah disusun merupakan jabaran kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020, dan merupakan bagian dari Sistem Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahun 2021 dapat dijadikan acuan untuk proses penyusunan anggaran tahun 2021 sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Rencana pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan secara periodic perlu dipantau secara teratur, sehingga jika terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan pencapaian dapat diatasi sedini mungkin.

Selain itu evaluasi dimaksudkan juga untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Secara umum rencana kerja pembangunan perikanan tahun 2020 di Kabupaten Tapin dengan segala keterbatasan yang ada diupayakan terus agar dapat berjalan dengan baik serta secara bertahap dan berkesinambungan selalu diupayakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan dan digariskan bersama.

Pada hakekatnya berbagai kendala maupun tantangan yang dihadapi akan selalu dapat diupayakan untuk dicarikan jalan alternati penyelesaiannya secara koordinatif, bahkan kendala dan tantangan tersebut dapat memberikan motivasi untuk mengubahnya menjadi sebuah peluang dan kekuatan untuk mencapai visi dan misi bersama.

Disamping itu sarana penunjang bagi berlangsungnya kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan itu sendiri yang menyangkut aparat perikanan pada umumnya perlu mendapat perhatian baik dari aspek sumberdaya manusia, sarana perkantoran maupun sarana pendukung lainnya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari Kepala dan seluruh staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Tapin untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik

yang telah ditetapkan dan tujuan serta sasaran yang lebih terperinci. Kestinambungan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2021 berarti sudah memasuki tahun ke pertama berjalannya Renstra 2018 – 2023 yang telah memperlihatkan perkembangan menuju visi dan misi Kabupaten Tapin.

B. Saran

- Perlu perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan perikanan karena merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang strategis dan sangat prospektif untuk senantiasa dikembangkan dan diusahakan di kabupaten Tapin.
- Pembangunan melalui pendekatan kewilayahan dengan pola pengembangan kawasan diharapkan akan dapat mempercepat pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan
- Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perikanan akan senantiasa menjadi sebuah aspek yang perlu dan segera mendapat perhatian yang sangat serius.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD Dinas Perikanan TAHUN 2020
KABUPATEN TAPIN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2020 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2021	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Dinas Perikanan						1.602.809.524	0	0		6.150.019
3	Urusan Pilihan										
3	1 Kelautan dan Perikanan										
3	1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	608.142.024	0	0	100 19
3	1 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	72.600.000	0	0	12 bulan bulan 0
3	1 1 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN		Suits	12 bulan	49.194.850	0	0	12 bulan bulan 0
3	1 1 3 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN		Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.500.000	0	0	12 bulan bulan 0
3	1 1 4 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN		Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	12 bulan	61.800.000	0	0	bulan 0
3	1 1 5 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN		Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta pembinaan dan movev dalam daerah dan penas tani	12 bulan	374.042.174	0	0	bulan 0
3	1 1 6 Tapin Expo			TAPIN		Jumlah terlaksananya tapin expo	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali Kali 0
3	1 1 7 Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN		Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3.100.000	0	0	12 bulan Bulan 0
3	1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN		Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18.905.000	0	0	12 bulan Bulan 19
3	1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	70%	122.375.000	0	0	70 0
3	1 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	26 Unit	41.490.000	0	0	26 unit Unit 0
3	1 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor			TAPIN		Jumlah dan jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	15.000.000	0	0	20 buah Unit 0
3	1 2 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor					Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab	1 paket Paket	50.000.000	0	0	0 Paket Paket 0
3	1 2 5 Pengadaan peralatan kantor			TAPIN		jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	3 unit	15.885.000	0	0	unit 0

3	1	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	6.150.000	0	0	100	6.150.000	
3	1	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	6 laporan	3.550.000	0	0	laporan	3.550.000
3	1	3	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun		TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (Laporan)	6 laporan	2.600.000	0	0	laporan	2.600.000
3	1	4		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		KESEJAHTERAAN PEMBUDIDAYA IKAN	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	100%	526.480.000	0	0	100	0
3	1	4	1	Pengembangan BBI lokal linuh		TAPIN	(Bulan)	12 bulan	271.310.000	0	0	bulan	0
3	1	4	2	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan			Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok)	2 kelompok	255.170.000	0	0	5 kelompok	0
3	1	5		Program pengembangan perikanan tangkap		KESEJAHTERAAN PEMBUDIDAYA IKAN	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100%	145.385.000	0	0	100	0
3	1	5	2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan		TAPIN	jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan (kali)	15 kali	92.985.000	0	0	15 kali	0
							Jumlah pemantauan jual beli anak ikan (kali)	15 kali	0	0	0	20 kali	0
3	1	5	6	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan		TAPIN	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 bulan	52.400.000	0	0	bulan	0
3	1	6		Program Peningkatan Kualitas SDM, Kelembagaan dan Optimalisasi Produksi Perikanan		KESEJAHTERAAN PEMBUDIDAYA IKAN	Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100%	194.277.500	0	0	100	0
3	1	6	2	Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan		TAPIN	Jumlah waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan	12 bulan	94.385.000	0	0	bulan	0
3	1	6	4	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan		TAPIN	Jumlah uji sampel produk perikanan	10 sampel	81.830.000	0	0	sampel	0
							jumlah penanganan pasca panen dan promosi	6 kali	0	0	0	kali	0
3	1	6	6	Penumbuhkembangan Kelompok		TAPIN	Jumlah Kelompok perikanan yang naik kelas	7 kelompok	18.062.500	0	0	kelompok	0
TOTAL									1.602.809.524	0	0		6.150.019